



## Menghindari Konflik Berkomunikasi: Analisis Kebahasaan, Ilmu Komunikasi dan Kewarganegaraan dalam Kasus Ibu Kota Negara Baru yang Disebutkan “Tempat Jin Buang Anak”

### *Avoid Communicating Conflicts: The Analysis of Language, Communication Science, and Citizenship on the Case of The New State Capital Mentioned “Where Jin Throws Children”*

Junaidi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>STAI YASBA Kalianda Lampung Selatan/Jl. Lettu Rochani Kedaton No. 01 Kedaton, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Indonesia 35551  
Penulis Korespondensi: Telpn. +628218326581: e-mail: [bangjdj@gmail.com](mailto:bangjdj@gmail.com)

#### Abstrak

*YouTuber Edy Mulyadi dilaporkan ke polisi karena menyebutkan Kalimantan Timur yang akan menjadi Ibu Kota Negara baru sebagai tempat “Jin Buang Anak”. Pencemaran nama baik, diperdebatkan seiring berprosesnya kasus ini pada penegak hukum. Tidak mengherankan kasus ini menyita perhatian banyak pihak, dan penting pula untuk diteliti karena menyangkut masa depan bangsa dan negara yang Bhinega Tunggal Ika. Perlu kesepahaman, dan mencari solusi atas konflik komunikasi ini. Dengan analisis kualitatif deskriptif fakta-fakta pemberitaan, dikaitkan Ketatabahasaan, Ilmu Komunikasi dan Kewarganegaraan, kasus ini sesungguhnya tidak perlu terjadi dan memunculkan implikasi lain, jika komunikator mencermati hambatan-hambatan berkomunikasi, sehingga komunikasi bisa mengartikan sama apa yang dikomunikasi komunikator berupa pesan. Hambatan sosiologis, psikologis, semantik, mekanis, terlebih antropologis, mestinya jauh-jauh waktu sudah dicermati komunikator, sehingga bisa merancang pesan dengan sebaik mungkin. Jikapun akhirnya fenomena komunikasi massa ini menjadi konflik berujung kasus hukum, tentu tidak hanya bisa diselesaikan dengan jalur proses hukum, tetapi dimungkinkan pula dengan introspeksi para pihak terlibat, konsolidasi, kompromi, negosiasi, mediasi, ataupun musyawarah untuk mufakat.*

**Kata Kunci:** Analisis Kebahasaan, Analisis Ilmu Komunikasi, Analisis Kewarganegaraan, Konflik Berkomunikasi, Ibu Kota Negara Baru

#### Abstract

*YouTuber Edy Mulyadi was reported to the police for mentioning East Kalimantan, which will become the new state capital, as a place for “Jin Throwing Children”. Defamation is debated as this case proceeds to law enforcement. It is not surprising that this case has attracted the attention of many parties, and it is also important to investigate because it concerns the future of the nation and state which is Bhinega Tunggal Ika. Need understanding, and find a solution to this communication conflict. With a descriptive qualitative analysis of reporting facts, related to Grammar, Communication Studies and Citizenship, this case does not really need to happen and raises other implications, if the communicator pays attention to the communication barriers, so that the communicant can interpret the same what the communicator communicates in the form of a message. Sociological, psychological, semantic, mechanical, and especially anthropological barriers, communicators should have considered long ago, so that they can design messages as well as possible. Even if the phenomenon of mass communication eventually becomes a conflict that ends in a legal case, of course, it can not only be resolved through the legal process, but it is also possible with the introspection of the parties involved, consolidation, compromise, negotiation, mediation, or deliberation to reach a consensus.*

**Keywords:** Language analysis, Communication Science analysis, Citizenship analysis, Communicating conflicts, the New State Capital

## PENDAHULUAN

Konflik tidak bisa dilepaskan dengan perjuangan berbagai pihak untuk memperoleh sesuatu. Yang diperjuangkan bisa berupa kebendaan, nilai, status, kekuasaan, bahkan otoritas. Dalam kesempatan perjuangan tersebut, sebelum sampai kepada tujuan, sering diwarnai pertikaian dari tingkat paling rendah antar individu, antar kelompok kecil, sampai kepada konflik komunitas besar yang menguras energi.

Komunikasi menjadi alat untuk mencapai tujuan secara bersama, dengan fungsi-fungsinya dalam perspektif penyampaian pesan dalam bentuk bahasa atau lainnya, sehingga muncul persamaan persepsi. Berkomunikasi secara efektif dan efisien akan bisa mencapai tujuan secara tepat waktu sekaligus tepat penerahan sumber daya. Sebaliknya, *miscommunication* akan memicu terjadi konflik yang tidak hanya sampai kepada konflik berkomunikasi, tetapi juga berdampak kepada hal-hal lainnya.

Konflik komunikasi biasanya berawal dari ketidakpahaman komunikator terhadap siapa komunikannya. Komunikannya berupa personal-personal atau kelompok-kelompok dalam komunitas tertentu dengan latar belakang, idealisme dan tujuan hidup masing-masing, sangatlah rentan menimbulkan salah tafsir terhadap hal-hal yang tengah dikomunikasikan. Jika saja komunikator paham dengan siapa ia akan berkomunikasi, maka ia akan bisa merancang pesan yang akan disampaikan. Tidak hanya dalam merencanakan wujud ungkapan-ungkapan, diksi-diksi, frasa-frasa, atau kalimat-kalimat, lebih besar lagi dalam bentuk wacana-wacana, audio-bisual, tetapi juga menggunakan simbol-simbol, bahkan ekspresi wajah. Lalu, merencanakan media apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut, dengan segala bentuk karakternya, sehingga terjadi komunikasi yang lebih efektif. Dengan demikian, menyampaikan pesan yang terlihat sederhana, sesungguhnya harus lebih teliti dan rinci lagi, jika berhadapan akan menyampaikan pesan yang memiliki muatan yang penting bahkan sensitif.

Latar belakang status sosial yang berbeda, tingkat pendidikan yang tidak sama, pekerjaan yang beragam, budaya yang bhineka, sampai kepada kualifikasi diri untuk mendapatkan akses pada pusat-pusat kekuasaan, membuat setiap kelompok atau komunitas-komunitas komunikannya, harus diperlakukan berbeda pula. Dalam situasi seperti inilah diperlukan seni dalam melakukan komunikasi, sehingga dapat melengkapi pemanfaatan ilmu komunikasi lebih efektif. Dalam ilmu komunikasi yang disebut sebagai hambatan dalam berkomunikasi, yang menimbulkan salah paham, sehingga tidak adanya kesamaan pengertian pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikannya, dalam kualifikasi individu-individu atau kelompok-kelompok komunikannya itu, tidak hanya kemudian bisa menimbulkan ketegangan dalam berkomunikasi, tetapi juga sering pula berlanjut dalam kasus hukum.

Kasus hukum terbaru yang dimulai dari kurang memahami komunikannya, adalah kasus YouTuber Edy Mulyadi yang dilaporkan ke polisi karena menyebutkan Kalimantan Timur yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru sebagai “tempat jin buang anak”. Edy Mulyadi dilaporkan atas sejumlah kasus di beberapa Polda. Ia dilaporkan ke Polda Sumatera Utara (Sumut), Polda Kalimantan Timur (Kaltim), Polda Kalimantan Barat (Kalbar), dan Polda Sulawesi Utara (Sulut), dan Polda lain. Pelaporan-pelaporan tersebut akhirnya ditarik seluruhnya ke Bareskrim Polri. Anonim (2022), Edy Mulyadi selain dilaporkan ke Polda-Polda dalam konteks supaya diusut secara hukum, juga didemo di sejumlah daerah, dan “dipertanyakan” dengan “pernyataan sikap” dari sejumlah elemen masyarakat di Indonesia. Di balik itu semua, ia juga dibela banyak elemen, termasuk yang kontra dengan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Anonim (2022), IKN Indonesia yang sudah diberi nama Nusantara ini, tepatnya terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim. Adapun batas-batas wilayahnya yaitu: di selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan; Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Utara; dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Di barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Di utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, serta di timur berbatasan dengan Selat Makassar. Fakta geografis itulah antara lain yang menjadi awal munculnya konflik komunikasi yang berujung kasus hukum. Kasusnya menjadi besar, seiringan komunikannya tengah tersekat-sekat atas kontroversi pindahnya IKN ke Kaltim. Setidaknya ada pihak yang mendukung pindahnya IKN. Di sisi lain, ada pula yang menolak, dan ada pula yang bersikap netral. Ekspresi mendukung dan menolak, atau yang netral, juga sering diperlihatkan dengan kontras.

Konflik pindahnya IKN, tidak hanya menyangkut segenap warga negara Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian atau kepentingan negara lain. Asset yang akan dimanfaatkan, atau mungkin akan terbengkalai juga sangat besar nilainya. Aparatur negara yang akan dikerahkan juga banyak. Bahkan regulasi yang memayunginya juga akan banyak, dan akan mengubah banyak regulasi lain. Sebegitu besarnya konflik yang ada dalam konteks pemindahan IKN ini, membuat kasus Edy Mulyadi yang sesungguhnya adalah kasus komunikasi, menjadi besar pula pihak-pihak yang melibatkan diri. Maka dari itu, kasus ini menjadi sangat penting untuk diteliti, dan perlu dipahami banyak orang agar terhindar bisa menyelesaikan konflik dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, kasus ini bisa menjadi pelajaran dalam berkomunikasi, terutama komunikasi massa, agar tidak terjadi kasus lain dalam konteks yang berbeda.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran masalahnya. Jelasnya, laporan ini tidak berdasarkan suatu pengujian menggunakan metode statistik. Artinya, laporan ditulis bersifat elaboratif, dengan menggali informasi lebih dalam terhadap objek penelitian dengan tidak bergantung pada pengukuran numerik itu.

Data penelitian yang digunakan adalah data yang berasal dari publikasi-publikasi media massa yang kemudian dilaporkan secara deskriptif sehingga diketahui gambaran atau keadaan komunikasi YouTuber Edy Mulyadi dengan segala atributnya, yang kemudian melaporkan kasus ini ke polisi, karena Edy Mulyadi menyebutkan Kaltim yang akan menjadi IKN baru sebagai “tempat jin buang anak”.

Analisis untuk mendapatkan pemahaman lebih utuh dari komunikasi YouTuber Edy Mulyadi dengan segala atributnya, dalam penelitian kualitatif deskriptif ini untuk mendapatkan solusi atas kasus ini, dan sekaligus untuk memberi makna agar kasus dalam perspektif atau konteks yang berbeda tidak menimbulkan konflik berkomunikasi yang berujung kasus hukum.

Sugiyono (2016), penelitian kualitatif deskriptif digariskannya sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimentalia. Peneliti dalam hal ini sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan atau triangulasi.

**Menghindari Konflik Berkomunikasi: Analisis Kebahasaan, Ilmu Komunikasi dan Kewarganegaraan dalam Kasus Ibu Kota Negara Baru yang Disebutkan “Tempat Jin Buang Anak”**

Analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lebih jauh lagi, bahwa tujuan penelitian kualitatif deskriptif ini untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin personal, kelompok personal atau suatu kejadian yang hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang diharapkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan lain perkataan, dari penelitian kualitatif deskriptif ini, dapat menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan dan bagaimana dari suatu personal, populasi, situasi atau fenomena komunikasi yang melaporkan Edy Mulyadi karena menyebutkan Kaltim yang akan menjadi IKN baru sebagai “tempat jin buang anak”.

Penelitian ini tidak mengontrol atau memanipulasi variabel apapun, tetapi hanya mengamati dan mengukurnya secara kualitatif, maka diperlukan langkah-langkah lebih rinci yang hierarkhis, yaitu dengan pemilihan tema atau topik, pembacaan literatur, menentukan disain dan instrumen, mengumpulkan data, penyempurnaan data, pengolahan data, dan mem- persiapkan laporan penelitian.

Data yang merupakan suatu kumpulan informasi yang terdiri dari fakta-fakta yang memberikan gambaran luas terkait suatu keadaan, lebih banyak berupa data skunder dari penerbitan/penyiaran media massa. Atau, dengan kata lain, objek penelitian kualitatif deskriptif ini adalah teks, kata-kata, seperti dari dokumen, atau kata-kata tindakan orang-orang yang diamati berupa catatan, penyiaran dalam media massa (bukan dengan cara mengambil sendiri tanpa perantara), namun validasi dan akurasinya tetap menjadi perhatian dengan menggalinya dari sumber-sumber terpercaya.

Subjek penelitian yang mengacu pada informan, dalam hal ini data primer dari media massa yang menjadi sumber data, yang mengacu objek penelitian pada permasalahan yang sedang diselidiki, yakni komunikasi YouTuber Edy Mulyadi yang melaporkan kasus ini ke polisian tidak terima Kaltim disebut sebagai “tempat jin buang anak”. Dalam kesempatan pembahasan ini, tidak dilakukan analisa dari sisi hukum, tetapi lebih dengan analisis Kebahasaan, Ilmu Komunikasi dan Kewarganegaraan. Analisis dari sisi Kebahasaan karena kasus ini merupakan kasus komunikasi yang menggunakan bahasa dalam komunikasi massa. Dianalisis dari sudut Ilmu Komunikasi, karena memang ini adalah kasus komunikasi, terkhusus komunikasi massa. Sementara analisis dengan Ilmu Kewarganegaraan dilakukan, karena menyangkut perilaku warga dalam konteks bernegara yang harus memperhatikan hak orang lain, meletakkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan personal. Di samping itu, pemindahan IKN ke Kaltim dengan segala permasalahannya, adalah urusan negara yang harus berpatokan dengan regulasi menyangkut kenegaraan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ada tiga sudut pandang yang digunakan dalam pembahasan ini, yaitu: sudut pandang kebahasaan, sudut pandang komunikasi, dan sudut pandang kewarganegaraan.

### **Analisis Sudut Pandang Kebahasaan**

Kutipan dari ungkapan Edy Mulyadi yang diduga menghina Kaltim di konferensi persnya berbunyi, "Ini ada sebuah tempat elite, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak (IKN baru)."

Vidio itu diunggah di kanal youtube pada Minggu 23 Januari 2022. Dari kutipan ungkapan Edy Mulyadi itu, yang banyak dipersoalkan “tempat jin buang anak”. Dalam hal ini, untuk menyebut lokasi IKN di Kaltim. Selain dipersoalkan “tempat jin buang anak”, juga banyak dipersoalkan karena menyebut Prabowo Subiyanto yang jenderal bintang tiga seperti

hanya bisa “mengeong” atas persoalan IKN. Pelaporan Edi Mulyadi pun berkisar pada dua persoalan di atas yang dianggap menghina.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menindaklanjuti laporan kasus pencemaran nama baik tersebut. Sedikitnya 30 orang saksi dan 8 saksi ahli dimintai keterangan. Pihak Polri melansir, hingga 27 Januari 2022, total 38 orang saksi dimintai keterangan. Saksi itu diperiksa di wilayah berbeda. Penyidik meminta keterangan saksi di Kaltim, Jawa Timur, dan Jakarta. Pemeriksaan saksi di Kaltim sebanyak 10 orang. Pemeriksaan saksi di Jawa Tengah 2 orang, kemudian ketiga pemeriksaan saksi di Jakarta 3 orang. Sementara untuk ahli terdapat penambahan 3 orang. Total ahli yang dimintai keterangan berjumlah 8 orang. Mereka ahli menyangkut ITE, ahli sosiologi, ahli pidana, dan ahli bahasa. Pelapor sendiri terdiri atas pemuda lintas agama yang berasal dari GP Ansor, GMKI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, dan Pemuda Hindu di Kaltim. Ada pula laporan Perpedayak atau Persatuan Pemuda Dayak. Ada pula pelaporan di provinsi lain, seperti di Sumut, Sulut, dan sejumlah provinsi lainnya. Khusus Polda Sulut menerima pengaduan pada Sabtu, 22 Januari 2022 dari Ketua DPD Partai Gerindra Sulut, Conny Rumondor dengan nomor P/B/29/I/2022/SPKT/POLDA SULUT, menyangkut Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menhan Prabowo Subianto. Seiringan kasusnya berproses di kepolisian, Edy Mulyadi sempat memberi klarifikasi dengan mengatakan, istilah “tempat jin buang anak” itu untuk menggambarkan tempat yang jauh, dan bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu. Disebutkan, dulu kawasan Monumen Nasional atau Monas juga disebut “tempat jin buang anak”. Begitu pula, Bumi Serpong Damai (BSD) yang pada era 1980-1990-an juga termasuk “tempat jin buang anak”.

Safitri (2022), mengutip Pakar Bahasa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Hilmi Akmal mengatakan “tempat jin buang anak”, selain sebagai tempat yang jauh (dari pusat kota), juga masih sangat sepi, jarang penduduknya dan masih banyak semak belukar atau bahkan hutan belantara. Istilah “tempat jin buang anak” muncul di Jakarta sekitar tahun 60-an atau 70-an juga untuk menggambarkan daerah sekitar Jakarta yang masih sepi seperti Ciputat, Pamulang, dan Bintaro. Istilah “tempat jin buang anak” tersebut bisa dipahami dengan sudut pandang berbeda yakni secara semantik dan pragmatik. Semantik berkaitan dengan perasaan seseorang ketika mendengar istilah itu. pragmatik berkaitan dengan konteks. Hal itu termasuk dalam tindak tutur seseorang.

Christianingsih (2022), istilah “tempat jin buang anak” yang selama ini dipahami khususnya oleh warga Jakarta digunakan untuk merujuk suatu tempat yang jauh, terpencil, dan sepi. Dengan kata lain, tempat yang tidak enak untuk ditinggali. Bagi Christianingsih, soal IKN, sebenarnya bisa mengkritik pemerintah lewat sudut pandang lain, bukan Kaltim sebagai “tempat jin buang anak”. Misalnya isu yang patut disoroti adalah bagaimana pemerintah menjaga kelestarian hayati selama proyek IKN ini berjalan. Jangan sampai pembangunan IKN justru malah merusak hutan-hutan Kalimantan dan membuat luasnya semakin menciut tanpa arti.

Wahyuni (2022), istilah “tempat jin buang anak” di Palembang Sumatera Selatan biasanya diucapkan untuk mengungkapkan dengan candaan daerah yang terpencil dan jauh dari pusat kota. Ditambah lagi daerah itu belum dijamah fasilitas umum sehingga daerah seperti ini disebut “tempat jin buang anak”.

Pesatnya perkembangan kota Palembang membuat daerah yang dulu disebut “tempat jin buang anak” kini hilang. Wahyuni mengutip Pemerhati Sejarah Kota Palembang, Rd Muhammad Ikhsan, tempat yang dianggap jauh dari pusat keramaian pula dalam bahasa lokal sering disebut secara "penesan" sebagai “di ujung tulang” atau daerah yang sangat jauh. Dicontohkan, kawasan Jakabaring, dulu juga disebut secara "penesan" sebagai “di ujung tulang” atau daerah yang sangat jauh, atau “tempat jin buang anak”. Namun Jakabaring kemudian berkembang. Meskipun daerah ini terbentuk di awal tahun

**Menghindari Konflik Berkomunikasi: Analisis Kebahasaan, Ilmu Komunikasi dan Kewarganegaraan dalam Kasus Ibu Kota Negara Baru yang Disebutkan “Tempat Jin Buang Anak”**

1970-an, tidak bisa tidak diakui akselerasi percepatannya adalah saat even PON XVI tahun 2004 digelar, semakin berkembang. Setelah masa itu silih berganti perhelatan besar antarnegara terutama di bidang olahraga digelar di Jakabaring. SEA Games 2011 diantaranya yang membuat tempat yang kini bernama Jakabaring Sport City (JSC) itu diagendakan sebagai tempat perhelatan olahraga antarnegara. Ditambah lagi pertumbuhan fasilitas lainnya seperti perkantoran, Pasar Induk Jakabaring, waterpark, mal, perumahan dan lain sebagainya.

Uraian tentang “tempat jin buang anak” memang berkembang, tidak sampai kepada sebagai tempat yang jauh, tetapi juga berkembang sebagai tempat masih sangat sepi, jarang penduduknya dan masih banyak semak belukar atau bahkan hutan belantara. Lebih jauh “tempat jin buang anak” bisa diartikan pula tempat yang terpencil, dan sepi. Dengan kata lain, tempat yang tidak enak untuk ditinggali. Sampai dalam pengertian ini, memang tidak bisa disalahkan juga sejumlah elemen tidak terima dengan klaim lokasi baru IKN sebagai “tempat jin buang anak” karena mengandung pengertian yang negatif. Dari segi jarak, lokasi baru IKN memang jauh kalau ditinjau dari Jakarta misalnya. Dikutip dari kompas.com, lokasi baru IKN sebagian berada di Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim. Kota terdekat dari PPU adalah Balikpapan. Kota Balikpapan dan Kota PPU adalah kota administratif yang saling bertetangga. Jarak Kota Balikpapan dan PPU, yaitu 76,6 km. Kedua kota ini dipisahkan Teluk Kalimantan, sehingga seringkali perjalanan darat tidak dapat sepenuhnya dilakukan karena perjalanan harus menyeberangi Teluk Kalimantan yang terhubung dengan laut lepas. Perjalanan darat dapat dilakukan melalui Jalan Silkar KM 38 Samboja, namun memakan waktu cukup lama. Untuk perjalanan udara dapat melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman atau yang sering disebut Bandara SAMS Sepinggang, Balikpapan. Bandara SAMS Sepinggang merupakan bandara internasional yang melayani rute penerbangan ke sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Makassar dan sejumlah kota besar lainnya. Dari Bandara SAMS Sepinggang, penumpang dapat menggunakan taksi menuju Pelabuhan Kampung Baru untuk menyeberang menuju Penajam Paser Utara. Alternatif lain menyewa kendaraan untuk menggunakan jalur darat.

Ada beberapa pilihan transportasi untuk menuju ibu kota baru di Penajam Paser Utara dari Balikpapan dengan darat maupun laut. Pertama, dengan speedboat yang merupakan alternatif penyeberangan dari Balikpapan ke PPU atau sebaliknya. Waktu tempuh menggunakan speedboat sekitar 5 sampai 10 menit. Harga tiket berkisar Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu per orang. Selain itu, speedboat dapat dicarter dengan harga sewa Rp 100 ribu lebih. Penumpang yang ingin naik speedboat dapat melalui Pelabuhan Kampung Baru atau melalui Pelabuhan Chevron Balikpapan yang keduanya berada di Balikpapan. Jika melalui Pelabuhan Chevron Balikpapan, biasa penumpang harus menyewa dengan biaya Rp 120 sampai Rp 150 ribu. Alternatif lain adalah menggunakan speedboat dari Penajam Paser Utara yang mengantar penumpang ke Pelabuhan Chevron. Biasanya, biaya yang dikenakan sekitar Rp 20 sampai Rp 25 ribu.

Kedua, dengan kapal klotok. Penyeberangan dapat dilakukan dari Pelabuhan Klotok Kampung Baru. Kapal klotok menjadi transportasi alternatif dari Balikpapan ke PPU atau sebaliknya. Waktu tempuh kapal klotok sekitar 25 sampai 30 menit melalui Pelabuhan Kampung Baru ke Pelabuhan Penajam. Biaya setiap orang dikenakan Rp 10 ribu, sedangkan untuk sepeda motor dikenakan biaya Rp 35 ribu. Kapal klotok menjadi pilihan masyarakat karena murah dan aman.

Ketiga, kapal feri yang merupakan alternatif lain ke Penajam Paser Utara. Kapal feri akan melayani selama 24 jam dengan rute berangkat ke Balikpapan maupun ke Penajam Paser Utara. Waktu tempuh yang dilalui kapal feri cukup lama, yaitu 2 sampai 3 jam. Kapal feri tidak hanya mengangkut penumpang melainkan juga sepeda motor maupun mobil. Biaya yang dikeluarkan untuk sepeda motor sekitar Rp 35 ribu sedangkan mobil biaya termurah mulai Rp 300 ribu. Biaya tiket mobil tergantung ukuran mobil.

Keempat, jalan silkar KM 38 Samboja. Selain melalui rute laut, rute ke PPU dari Balikpapan dapat melalui jalur darat. Perjalanan darat dapat menggunakan kendaraan pribadi melewati Jalan Silkar KM 38 Samboja. Namun, rute perjalanan ini cukup jauh. Perjalanan membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam jika kondisi jalan bagus. Sebaliknya, jika kondisi jalan tidak bagus maka waktu tempuhnya bisa lebih panjang, yaitu sekitar 4 jam untuk masuk ke kota Balikpapan. Jika menggunakan perjalanan darat harus hati-hati, karena banyak jalan yang rusak.

Dengan demikian, dari Jakarta, lokasi baru IKN di PPU Kaltim memang jauh, sehingga layak disebut “tempat jin buang anak” seperti dimaksud Edy Mulyadi. Namun daerah ini bisa berkembang, seperti kawasan Monas, BSD, Ciputat, Pamulang, dan Bintaro. Bahkan seperti kawasan Jakabaring yang dulunya juga disebut sebagai “tempat jin buang anak.”

### **Sudut Pandang Komunikasi**

Stephen W. Robbin dalam Hasan (2021), konflik dalam pandangan tradisional (*the traditional view*), digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disetarakan dengan istilah kekerasan (*violence*), kerusakan (*destruction*), dan tidak rasional (*irrationality*). Konflik merupakan hasil disfungsi akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan.

Stephen W. Robbin masih dalam pandangan tradisionalnya menganggap konflik dapat dihindari. Walau tidak dijelaskan secara rinci bagaimana menghindari konflik tersebut, tetapi Stephen W. Robbin berkeyakinan bahwa konflik dapat mengacaukan organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal dalam organisasi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang optimal, konflik harus dihilangkan. Yang menarik, konflik dideskripsikan sebagai sesuatu yang biasanya disebabkan oleh kesalahan manajer dalam merancang dan memimpin organisasi. Dikarenakan kesalahan ini, manajer sebagai pihak manajemen bertugas meminimalisasikan konflik. Manajer dalam hal ini bisa saja dalam konteks yang luas, yakni dalam kasus Edy Mulyadi, sesungguhnya Edy Mulyadi bisa disebut sebagai manajer dalam produksi kontennya. Selain sebagai perancang konten sekaligus mengkoordinir orang-orang yang terlibat dalam perancangan itu, ia juga sebagai penyampai pesan atau presenter konten.

Sebagai seorang manajer, yang harus menerapkan fungsi-fungsi manajer, mulai dari *planning*, *organizing*, *actuating* sampai *controlling* --dalam produksi kontennya-- semestinya Edy Mulyadi mempertimbangkan banyak hal sebelum konten itu disampaikan ke publik. Dalam kasus Eddy Mulyadi, ia terbawa masuk dalam setidaknya tiga kutup konflik pemindahan IKN Indonesia. Kutup pertama terdiri dari orang-orang yang setuju atau mendukung dilakukan pemindahan IKN. Kutup kedua, adalah dari orang-orang yang tidak setuju dengan pemindahan IKN. Sedangkan kutup ketiga, terdiri dari orang-orang yang netral.

Pihak terakhir ini adalah orang-orang yang melihat berbagai keunggulan atau keuntungan, sekaligus juga bisa mempertimbangkan kelemahan atau kekurangan pemindahan IKN. Lebih penting lagi, pihak terakhir ini lebih memilih melihat dalam sudut pandang kerangka yang lebih besar, dan tidak mau terlibat dalam konflik. Saat Eddy Mulyadi memproduksi atau menyiarkan konten bernada penolakan IKN, otomatis ia sudah masuk dalam satu kutup dari kelompok-kelompok yang berkonflik tersebut. Mau tidak mau pula Edy Mulyadi harus siap dengan segala resikonya, termasuk munculnya resistensi dari setiap apa yang disampaikan terhadap argumennya. Memang tidak langsung atau bisa pula tidak ada kaitannya sehingga muncul kasus hukum ini, tetapi sangat kuat dugaan, dengan masuknya

**Menghindari Konflik Berkomunikasi: Analisis Kebahasaan, Ilmu Komunikasi dan Kewarganegaraan dalam Kasus Ibu Kota Negara Baru yang Disebutkan “Tempat Jin Buang Anak”**

Edy Mulyadi dalam satu blok konflik pemindahan IKN, sangat mungkin membuat bertambah runyam persoalan yang dihadapkannya atas cara-cara berkomunikasi dalam konteks penoloan IKN tersebut.

Keracuan-keracuan akan muncul dalam komunikasi massa yang telah dipicu dengan sang presenter sekaligus sutradara/manajer. Salah tafsir, salah pemahaman, atau salah melihat *angle*, ataupun tujuan komunikasi, membuat gugatan terhadap Edy Mulyadi datang dari berbagai pihak. Dalam ilmu komunikasi, Eddy Mulyadi tidak bisa mengatasi hambatan-hambatan berkomunikasi yang merupakan antisipasi agar tidak muncul konflik berkomunikasi. Effendy (1992), dalam ilmu komunikasi, ada enam hambatan berkomunikasi, yakni hambatan sosiologis, hambatan antropologis, hambatan psikologis, hambatan semantik, dan hambatan mekanis. Kasus Edy Mulyadi ini bisa dianalisis dalam kerangka teori hambatan berkomunikasi ini, sebagai antisipasi awal agar tidak munculnya konflik setelah dilakukan komunikasi. Dari sisi hambatan sosiologis, Edy Mulyadi tampak terjerumus dalam salah menafsirkan, apakah dia akan berkomunikasi secara pribadi atau dalam struktur strata masyarakat tertentu. Kalaulah ia tengah berkomunikasi secara pribadi, tentu berkomunikasi dengan istri dan anak misalnya, tidak akan menjumpai banyak hambatan karena sifatnya personal atau pribadi sehingga dapat dilakukan dengan pilihan kata, ungkapan dan seterusnya, yang personal. Sebaliknya jika ia berkomunikasi dengan seseorang atau kelompok orang dengan strata tertentu, dengan kedudukan lebih tinggi misalnya, maka perlu melakukan pemilihan diksi yang tepat. Terlebih berbicara dengan komunikan yang beragam, tentu harus memilih diksi yang lebih universal, dan menjauhi diksi-diksi, ungkapan-ungkapan, dan faktor pendukung komunikasi lainnya, yang sensitif.

Berdasarkan sisi hambatan antropologis, yakni dilihat dari sudut budaya, maka Edy Mulyadi telah gagal mengkomunikasikan makna “tempat jin buang anak”. Ternyata di tempat tertentu bisa diterima, tetapi di tempat lain atau situasi lain, menimbulkan makna atau reaksi yang berbeda. Dalam konteks komunikan di Kaltim, diartikan sebagai penghinaan atau merendahkan. Dari uraian sebelumnya, “tempat jin buang anak” tidak hanya sampai pada makna tempat yang jauh, tetapi berkembang sebagai tempat sepi, jarang penduduknya, masih semak belukar, dan hutan belantara. Tempat yang terpencil dan sepi, bisa pula berarti tidak enak untuk ditinggali. Sampai dalam pengertian ini, memang tidak bisa disalahkan juga sejumlah elemen tidak terima dengan klaim lokasi baru IKN sebagai “tempat jin buang anak” karena mengandung pengertian yang negatif.

Berdasarkan sisi hambatan psikologis, yakni hambatan dari pikiran dan perilaku manusia, ketika orang sedang sedih, bingung, marah, kecewa, iri hati, dan kondisi psikologis lainnya seperti prasangka, *like dis lake* (senang tidak senang), simpati, empati dan seterusnya, menghambat proses komunikasi, maka akan bisa memicu banyak hal atas komunikasi yang salah sasaran tersebut. Sejumlah warga, atau kelompok-kelompok tertentu tengah tersekat-sekat dalam banyak perasaan atas IKN di Kaltim. Ada yang gembira, karena misalnya akan mendapat keuntungan ekonomis karena banyak tanahnya bisa dibisnisnya. Personal atau kelompok ini tentu akan hilang harapan berbisnis tanahnya ketika Edy Mulyadi mencoba secara tajam menolak IKN di Kaltim. Begitu pula orang atau kelompok orang yang kondisi psikologis lainnya seperti berprasangka, *like dis lake*, dan dan seterusnya, teraduk-aduk oleh gaya berkomunikasi Edy Mulyadi.

Selanjutnya, hambatan semantik yakni seperti salah ucap, salah tulis, lalu bisa pula salah memakai kata yang satu tempat dengan tempat lainnya berbeda artinya, seperti “urang”: Sunda (aku), Jawa (udang), dan Minang (orang), atau “sampean”: Jawa (memanggil kamu), Sunda (kaki), selanjutnya kata “kasep”: Sunda (ganteng), Jawa (udah terlambat), dan “angel”: Jawa (susah), Sunda (lama), atau contoh-contoh lain dalam



kesalahan semantik, sangat rawan menimbulkan perbedaan penafsiran atau perbedaan reaksi, sehingga memunculkan masalah komunikasi di kemudian hari.

Begitu pula dengan hambatan mekanis seperti suara telepon yang krek-krek, ketikan huruf yang salah, huruf buram di tulisan, suara yang hilang muncul, naskah tidak lengkap, foto/visual “ngeblur”, foto/visual tidak ada deskripsinya, foto/visual yang salah teksnya, atau dalam contoh mekanis lainnya, yang bisa terjadi dalam konteks komunikasi Edy Mulyadi, juga bisa menghambat pemahaman atas tujuan dari komunikasinya. Edy Mulyadi tentu tidak bisa berharap sinyal internet/handphone, atau kecanggihan teknologi sama dengan di Jakarta dengan warga di Kaltim. Tentu bisa pula terjadi hambatan hambatan ekologis, yakni hambatan karena alam/lingkungan seperti suara bising orang-orang di pasar di mana komunikasi tengah berada, suara kereta api lewat, suara pesawat lewat, atau hambatan ekologis lainnya yang mungkin terjadi dalam konteks komunikasi Edy Mulyadi, maka sangat mungkin berkontribusi dalam memperumit masalah komunikasinya. Tidak bisa diharapkan semua warga yang menyaksikan audio visual Edy Mulyadi di Youtube sedang berada di ruang yang nyaman, kedap suara, atau seterusnya. Komunin Edy Mulyadi bisa saja tengah berada di kebun, di pasar, di terminal, di bandara, atau tengah melaut, di gunung, yang kesemuanya itu tidak bisa dilepaskan dari gangguan secara ekologis.

Berdasarkan analisis dari sudut pandang ilmu komunikasi dapat dikatakan bahwa Edy Mulyadi dapat menghindari masalah dalam berkomunikasi, sehingga bisa terhindar dari konflik berujung proses hukum, kalau ia bisa mengenali komunikannya dengan latar belakang sosiologisnya, antropologisnya, dan psikologisnya. Yang tidak kalah pentingnya, saat akan dilakukan proses berkomunikasi, sudah harus dipastikan tidak ada hambatan mekanis dan hambatan ekologis, antara komunikator yang menyampaikan pesan dengan komunikan yang menerima pesan.

### **Sudut Pandang Kewarganegaraan**

Suryana dan Kaswan (2015), menggariskan untuk mengatasi konflik, ada 7 hal yang bisa dilakukan, yakni introspeksi diri, musyawarah, melakukan mediasi, negosiasi, konsolidasi, dan kompromi. Tujuh hal tersebut berpotensi besar mengatasi atau menyelesaikan konflik jika telah terjadi. Secara personal bisa dilakukan mulai dengan melakukan introspeksi diri. Dalam hal ini yang dimaksud introspeksi diri adalah cara seseorang untuk melihat dirinya atau merefleksikan pikiran, emosi, dan ingatannya terhadap sesuatu hal.

Dengan melakukan introspeksi diri, antara lain seseorang dapat segera menyadari atas kesalahan dan segera misalnya melakukan permintaan maaf. Dalam hal ini, Edy Mulyadi telah melakukan permintaan maaf atas kemungkinan kesalahan yang telah terlanjur mengatakan IKN di Kaltim seperti “tempat jin buang anak”. Persoalan kemudian, apakah orang-orang yang merasa telah dihina atau dilecehkan, segera menyahuti permintaan maaf Edy Mulyadi? Kalau disambut dengan lapang dada (mungkin setelah melakukan introspeksi juga dengan menyadari berkasus secara hukum tidaklah lebih baik dan akan hanya menguras energi), maka kasusnya akan segera dapat diselesaikan.

Dalam cakupan yang lebih besar, menyelesaikan konflik bisa dilakukan dengan musyawarah. Yang dimaksud dengan bermusyawarah adalah membicarakan suatu masalah secara bersama-sama, melibatkan pihak-pihak yang bertingkaik dan pihak lain seperti warga yang terlibat langsung, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah setempat, dan lainnya. Tentu keputusan akhir yang diambil dari musyawarah harus dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam hal kasus Edy Mulyadi, musyawarah bisa dilaksanakan dengan “kepala dingin” atau tenang dan sabar. Setiap orang yang bermusyawarah perlu punya kemampuan untuk bersikap tenang, terutama saat menghadapi suatu masalah yang membuat emosi bisa memuncak. Di samping

**Menghindari Konflik Berkomunikasi: Analisis Kebahasaan, Ilmu Komunikasi dan Kewarganegaraan dalam Kasus Ibu Kota Negara Baru yang Disebutkan “Tempat Jin Buang Anak”**

itu, bisa pula menyelesaikan konflik Edy Mulyadi dengan melalui mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak-pihak ketiga. Tentu pihak ketiga yang dimaksud adalah orang yang dipercaya bagi pihak-pihak yang bertikai. Walau dalam mediasi tidak diberikan keputusan yang mengikat, tetapi mediasi sering digunakan karena sangat ampuh dalam menyelesaikan konflik. Kemampuan mediator yang biasanya dari orang-orang yang netral terhadap pihak-pihak berkonflik, sangat diharapkan mupun.

Penyelesaian konflik bisa pula dengan melakukan negosiasi, yaitu dengan perundingan yang dilakukan secara langsung antarpihak. Tujuan dari negosiasi jelas untuk menyelesaikan sengketa. Karena negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga, maka pihak-pihak yang bertikai haruslah bisa berpikiran positif, berkepada dingin, dan bisa pula diawali dengan introspeksi diri. Ungkap “mengalah untuk menang” salah satu sikap yang bisa menyukkseskan negosiasi. Layaknya bernegosiasi, tentu ada tawaran atau permintaan dari satu pihak, dan pihak lain harus bisa menyahutinya, sehingga muncul *win-win solution* yang berarti penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak. Sedangkan cara lain untuk menyelesaikan konflik adalah melakukan konsolidasi. Yang dimaksud dengan konsolidasi adalah dengan mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama. Dapat pula dilakukan kompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang berselisih. Jalan tengah dimaksud adalah dengan kesadaran bagi pihak terlibat dalam konflik. Dapatlah diambil kesimpulan, dalam penyelesaian konflik berkomunikasi dalam kasus IKN yang disebutkan Edi Mulyadi sebagai “tempat jin buang anak”, dapat dilakukan dengan introspeksi diri, musyawarah, mediasi, negosiasi, konsolidasi, dan kompromi. Artinya penyelesaian secara jalur hukum tidak tunggal dalam penyelesaian kasus “tempat jin buang anak” ini.

Cara-cara, dengan melakukan introspeksi diri, bermusyawarah, bermediasi, bernegosiasi, berkonsolidasi, dan melakukan kompromi, dilakukan jika seorang komunikator kecolongan sehingga tidak bisa menangani hambatan-hambatan berkomunikasi sebelum terjadinya proses komunikasi, yang bisa berupa hambatan mekanis, semantik, psikologis, terlebih hambatan sosiologis dan antropologis.

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Kasus YouTuber Edy Mulyadi yang diproses melalui jalur hukum karena menyebutkan Kaltim IKN baru “tempat jin buang anak” menyita perhatian banyak pihak, dan penting untuk dianalisis karena menyangkut masa depan bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Perlu kesepahaman mencari solusi konflik ini. Analisis sudut pandang kebahasaan, komunikasi, dan kewarganegaraan, melengkapi laporan ini yang kualitatif deskriptif.

Dari sudut pandang kebahasaan, “tempat jin buang anak” tidak hanya mengandung makna tempat yang jauh, tetapi juga tempat sepi, jarang penduduknya, masih semak belukar, bahkan masih hutan belantara. Bisa pula diartikan terpencil, sepi, yang pada gilirannya memunculkan persepsi tempat yang tidak enak ditinggali. Sampai pengertian ini, tidak bisa disalahkan sejumlah elemen tidak terima dengan klaim lokasi baru IKN sebagai “tempat jin buang anak” karena mengandung makna negatif.

Dari sudut pandang komunikasi, apalagi dalam konteks komunikasi massa dengan kerumitannya, untuk menghindari terjadinya konflik akibat berkomunikasi, perlu terlebih dahulu tahu dengan siapa berkomunikasi (siapa komunikannya), dan menyelesaikan hambatan-hambatan berkomunikasi, seperti hambatan sosiologis, psikologis, semantik, mekanis, terlebih antropologis. Jika akhirnya dalam berkomunikasi tetap berkonflik, terlebih berujung proses hukum, tentu tidak hanya bisa diselesaikan dengan jalur hukum, tetapi dimungkinkan pula dengan introspeksi para pihak, konsolidasi, kompromi, negosiasi, mediasi, ataupun musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2021). Manajemen Konflik Dan Penyelesaiannya Dalam Pandangan Islam. Probolinggo: Universitas Islam Zainul Hasan
- \_\_\_\_\_. (2022). Detail Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara. Jakarta: detik.com
- \_\_\_\_\_. (2022). Cara Menuju Penajam Paser Utara, Ibu Kota Baru Nusantara, dengan Transportasi Darat, Laut, dan Udara. Jakarta: kompas.com.
- \_\_\_\_\_. (2022). Ramai-Ramai Edy Mulyadi Dilaporkan Polisi, Kini Kasusnya Ditarik keMabes Polri. Jakarta: Tribunnews.com
- Christianingsih. (2022). Indonesia Menyumbang 72 Persen Produksi Oksigen Dunia, 44 Persennya dari Kaltim. Jakarta: Republika.co.id
- Effendy, OU. M.A. (1992). Dinamika Komunikasi. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya
- Safitri. E. (2022). Membedah Makna 'Jin Buang Anak' Edy Mulyadi. Jakarta: DetikNews
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Weni Wahyuni. (2022). Mengenal Istilah Tempat Jin Buang Anak di Palembang. Palembang: sumsel.tribunnews.com
- Suryana, E., Kaswan. (2015). Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa. Bandung: STKIP Siliwangi